

# Studi Sejarah Berhutang pada Peristiwa 1965

**Grace Leksana & Yerry Wirawan**

Bagaimana edisi ini dapat menawarkan pembahasan yang baru bagi sejarawan, dari segi metode dan historiografi tentang 1965, adalah salah satu persoalan yang menjadi perhatian tim editor dalam diskusi yang cukup pelik ketika merencanakan penerbitan edisi khusus Peristiwa 1965 ini. Singkatnya, kami memulai dengan pertanyaan, apa saja sumbangan Peristiwa 1965 bagi perkembangan studi sejarah di Indonesia? Secara ringkas dapat dikatakan, setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, studi sejarah tentang Peristiwa 1965 berkembang pesat dalam bentuk-bentuk yang dulu tidak pernah terbayangkan. Pada periode sebelumnya misalnya, penggunaan arsip-arsip militer tentang 1965 terbilang hampir tidak mungkin dilakukan, tetapi kini sejumlah peneliti justru menerbitkan studi-studi mereka tentang kekerasan lokal dengan menggunakan arsip-arsip militer sebagai sumber primer, seperti studi Jess Melvin (2018) tentang Aceh, Ahmad N. Luthfi (2018) tentang kekerasan di Banyuwangi, dan Grace Leksana (2021) tentang kolaborasi sipil dan militer di Jawa Timur.

Selain itu, berkat kemunculan film dokumenter Joshua Oppenheimer, *Jagal* (2012) dan *Senyap* (2014), yang semakin meramaikan diskusi tentang ingatan kolektif peristiwa 1965, kajian sejarah Peristiwa 1965 juga turut meluas. Setidaknya, film *Jagal* juga mulai merintis pembicaraan tentang studi pelaku kekerasan 1965, yang sebelumnya lebih banyak diisi oleh pembicaraan tentang korban. Majalah *Tempo* (2013) mempublikasikan pengakuan para pelaku. Pada tataran yudisial, penyelenggaraan *International People's Tribunal 1965* di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015 kembali menegaskan peristiwa 1965 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan mendesak pertanggungjawaban pemerintah Indonesia. Selang beberapa bulan sesudahnya, Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa, didukung oleh Menkopolhukam, mengadakan Simposium Nasional “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” pada 18-19 April 2016. Simposium ini sengaja memilih pendekatan kesejarahan untuk mengupayakan rekonsiliasi nasional Peristiwa 1965. Seluruh perkembangan ini memunculkan pertanyaan di antara kami, para editor. Jika sejarah menjadi pijakan untuk memulai sebuah rekonsiliasi, bagaimana dengan sebaliknya—bagaimana perkembangan sejarah sebagai sebuah ilmu dan kaitannya dengan wacana 1965? Apakah perkembangan pesat wacana 1965 juga diikuti secara paralel dengan perkembangan diskusi dan perdebatan historiografi?

Saat mendiskusikan pertanyaan tersebut, kami mencermati kembali masa pasca-Reformasi, ketika sejarah menjadi sorotan utama dalam upaya demokratisasi di Indonesia. Perkembangan

ini ditandai dengan dua hal. Pertama, tinjauan kritis terhadap historiografi Indonesia berkembang luas. Tuntutan untuk keluar dari penulisan sejarah yang militeristis, berbasis pada elite, dan memarjinalkan kelompok tertentu menjadi lebih intensif (Purwanto & Adam, 2005; Schulte Nordholt et al., 2008). Muncul harapan terhadap sejarah agar dapat kembali pada perannya sebagai elemen pembangun identitas bangsa yang inklusif sekaligus berbasis pada keberagaman. Kedua, sejarah memberikan kontribusi besar dalam pengungkapan kebenaran dalam keadilan transisional. Semisal, pendekatan "sejarah dari bawah" atau metode sejarah lisan (Roosa et al., 2004) yang membantu dalam proses-proses investigasi kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu dengan mengangkat perspektif korban yang selama ini dipinggirkan dalam narasi-narasi sejarah resmi. Peristiwa 1965 pasca-Reformasi tidak hanya dipandang sebagai sebuah peristiwa sejarah saja, yang membuka peluang tinjauan kritis terhadap historiografi Indonesia, tetapi juga sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM, ketika berbagai temuan menunjukkan peran negara di balik kekerasan antikomunis sepanjang 1965-1968. Sejalan dengan itu, muncul tuntutan untuk merevisi penulisan sejarah, atau gerakan "meluruskan sejarah", dengan mengikutsertakan narasi kekerasan dalam historiografi 1965.

Kini sudah 23 tahun pasca-Reformasi, studi-studi tentang 1965 yang beragam mulai bergeser dari penitikberatan terhadap advokasi dan pengungkapan kebenaran menuju pada upaya-upaya untuk mempertanyakan secara kritis pada kompleksitas peristiwa yang selama ini tenggelam dalam wacana advokasi HAM. Istilah "pelurusan sejarah" atau "mempublikkan sejarah tersembunyi" mulai dikritik, karena istilah tersebut berisiko untuk menyamaratakan narasi kekerasan sebagai sesuatu yang tersembunyi, sunyi 'silent', sekaligus gagal untuk melihat bahwa narasi-narasi tersebut menciptakan bahasa tersendiri yang tidak mampu keluar begitu saja di ruang publik (Santikarma, 2008). Kritik lainnya adalah pemisahan antara korban dan pelaku, yang menjadi elemen utama dalam investigasi HAM. Posisi korban dan pelaku harus jelas agar lembaga negara mampu membuat laporan dan tuntutan resmi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1965. Akan tetapi, kategorisasi dan pemisahan biner tersebut mendekontekstualisasi proses kekerasan serta membuat kita lupa bahwa dalam banyak konteks peristiwa kekerasan 1965 yang terjadi di tingkat desa, dalam hal ini korban dan pelaku di pedesaan tetap melanjutkan hidupnya dalam ruang yang sama. Korban dan pelaku harus dilihat lebih dari sekadar kategori, maka mereka juga ditempatkan sebagai sebuah proses-konteks apa yang memunculkan mereka sebagai korban dan pelaku, dan bagaimana nasib mereka setelah peristiwa kekerasan terjadi?

Catatan-catatan kritis tentang pendekatan keadilan transisional dalam peristiwa 1965 juga menjadi refleksi bagi ilmu sejarah. Bagaimana kritik elite sentris dalam penulisan sejarah termanifestasikan dalam pembaharuan penulisan sejarah nasional itu sendiri? Bagaimana dengan perdebatan metodologis yang dimunculkan dalam penelitian 1965—sejauh mana perdebatan tersebut juga menjadi perdebatan penelitian sejarah? Lebih spesifik lagi, bagaimana dengan pembahasan tentang arsip dan pengarsipan, yang memunculkan temuan baru dalam penelitian 1965? Apakah temuan tersebut juga menyumbangkan cara baca baru terhadap sumber-sumber arsip sejarah atau membawa sejarawan untuk memperluas definisi dan bentuk "arsip sejarah"? Bagaimana dengan ingatan kolektif? Apakah kita bisa mengklaim studi ingatan sebagai bagian dari studi sejarah? Bagaimana dengan analisa kekerasan peristiwa 1965, yang lebih didominasi oleh kolaborasi sipil dan militer daripada kekuatan tentara sendiri? Dapatkah kita menawarkan

analisis baru tentang kekerasan tersebut, yang turut menyumbangkan ide baru dalam studi-studi kekerasan dan genosida pada umumnya? Sejauh mana sejarah dapat keluar dari kompartemen keilmuannya dan bekerja sama dengan bidang keilmuan lain untuk menganalisa peristiwa kekerasan 1965? Dan dari pengalaman kolaborasi tersebut, apa tawaran kita terhadap istilah trendi “pendekatan interdisipliner”? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergulir, dan akan terus muncul seiring dengan bertambahnya penelitian-penelitian baru tentang peristiwa 1965. Pada saat yang bersamaan, tanpa menafikan kenyataan bahwa masih banyak aspek-aspek lain yang perlu digali dari peristiwa 1965, (setidaknya) para sejarawan masih kewalahan untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Edisi ini tidak berpretensi untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di atas, tapi lebih merupakan pemantik untuk menggulirkan refleksi ilmu kesejarahan dari peristiwa 1965. Pembahasan peristiwa 1965 bukan sesuatu yang baru bagi *Jurnal Sejarah*. Kami juga pernah menerbitkan edisi khusus 1965 dengan editor Asvi Warman Adam pada tahun 2000. Namun dalam edisi ini, kami berusaha memberikan ruang yang lebih luas pada generasi muda yang bergerak dalam isu kekerasan 1965. Dalam edisi ini, riset Kelana Wisnu menunjukkan sebuah pendekatan baru, yakni menawarkan musik sebagai sebuah sumber sejarah. Musik tidak hanya menjadi bagian dari gerakan kultural pasca konflik dan rekonsiliasi, tetapi juga sebagai jejak ingatan kekerasan 1965, terutama bagi para tahanan politik yang menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di penjara. Edisi ini juga memuat dua wawancara dari narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Wawancara pertama kami lakukan dengan Olle Tornquist, profesor Ilmu Politik dan Kajian Pembangunan dari Universitas Oslo, Norwegia, yang baru saja menerbitkan buku barunya *In Search of New Social Democracy: Insights from the South, Implications for the North* (Bloomsbury Publishing). Dalam wawancara ini, kami berangkat dari studi sejarah Peristiwa 1965 dalam kaitan dengan konteks sosial politik Indonesia hari ini. Secara khusus, Olle Tornquist mengulas alasan mengenai organisasi Kiri yang tidak muncul kembali, bahkan setelah Reformasi. Wawancara kedua kami lakukan dengan tiga orang seniman muda, Rangga Purbaya, Mega Nur, dan Yesa Utomo yang memilih tema 1965 dalam karya-karya mereka. Hasil karya anak-anak muda ini sangat menarik karena menggunakan medium seni untuk mendiskusikan sejarah Peristiwa 1965. Hal yang menarik berikutnya adalah ide mereka tentang rekonsiliasi yang ingin keluar dari kategori biner pelaku dan korban. Terakhir, tim editor juga memuat sebuah ulasan buku tentang ritual adat Gren di NTT sebagai sebuah upaya rekonsiliasi kultural yang dibahas secara kritis oleh Martin Elvanyus de Porres.

Sebagai penutup, kami kembali ke pertanyaan di awal penerbitan ini, apa sumbangan Peristiwa 1965 dalam perkembangan studi sejarah di Indonesia? Dengan mencermati perkembangan ilmu sejarah yang terkini, deretan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di atas, serta kajian-kajian yang kami sajikan di edisi khusus ini, kemudian kami menyadari bahwa sesungguhnya Peristiwa 1965 telah membawa studi sejarah di Indonesia ke dimensi yang lebih luas dan berkembang jauh dalam metode sejarahnya mulai di tingkatan sumber, interpretasi dan historiografinya. Kajian tentang 1965 saat ini tidak hanya bergerak dalam ranah investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang kekerasan, tetapi juga mengembangkan penulisan historiografi Indonesia. Kajian-kajian sejarah Peristiwa 1965 ini bahkan meluas dalam karya-karya seni yang secara bentuk dapat dikatakan melampaui historiografi konvensional yang selama ini kita kenal. Lebih jauh lagi, karya-karya ini bahkan mampu membuat kita berpikir

ulang tentang makna rekonsiliasi dan pendekatan yang berbeda untuk membicarakan "kekerasan". Karenanya, terkait pertanyaan di awal, mungkin persoalannya bukan apa yang menjadi sumbangan Peristiwa 1965 bagi studi sejarah tetapi bahwa studi sejarah di Indonesia berhutang pada Peristiwa 1965. Dari studi tentang Peristiwa 1965 inilah, para peneliti sejarah dimampukan untuk menjelajah lebih luas dan menawarkan pemahaman-pemahaman baru, baik secara keilmuan maupun metodologis yang berguna untuk pengembangan dunia ilmu sejarah. Oleh karena itu, penelitian dan penulisan sejarah Peristiwa 1965 secara terus menerus menjadi hal yang penting.

## Daftar Pustaka

- Leksana, G. (2021). Collaboration in Mass Violence: The Case of the Indonesian Anti-Leftist Mass Killings in 1965–66 in East Java. *Journal of Genocide Research*, 23(1), 58–80.
- Luthfi, A. (2018). Kekerasan Kemanusiaan dan Perampasan Tanah Pasca- 1965 di Banyuwangi, Jawa Timur. *Archipel*, No. 95, 53–68.
- Melvin, J. (2018). *The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder*. Routledge.
- Purwanto, B., & Adam, A. W. (2005). *Menggugat historiografi Indonesia*. Ombak.
- Roosa, J., Ratih, A., & Farid, H. (2004). Pengantar: Sejarah Lisan dan Ingatan Sosial. In J. Roosa, A. Ratih, & H. Farid (Eds.), *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65: Esai-esai Sejarah Lisan*. (pp. 1–23). ISSI, ELSAM& TRK.
- Santikarma, D. (2008). Menulis Sejarah dan Membaca Kuasa: Politik Pasca-1965 di Bali. In H. Schulte Nordholt, B. Poerwanto, & R. Saptari (Eds.), *Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia* (pp. 201–215). KITLV, Yayasan Obor Indonesia, Pustaka Larasan.
- Schulte Nordholt, H., Purwanto, B., & Saptari, R. (2008). Memikir Ulang Historiografi Indonesia. In H. Schulte Nordholt, B. Purwanto, & R. Saptari (Eds.), *Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia* (pp. 1–31). KITLV, Yayasan Obor Indonesia, Pustaka Larasan.